

SKRIPSI
IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI MATERI MUATAN
UNDANG-UNDANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh:

BAGAS AL'KAUTSAR

1810112097

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK V)

Pembimbing:

- 1. Yunita Syofyan,SH.,MH**
- 2. Beni Kharisma Arrasuli,SH.,MH**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jelas menerangkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari materi muatan undang-undang. Ketundukan dan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk nyata dari kesetiaan terhadap konstitusi itu sendiri, dengan kata lain ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bentuk ketidaksetiaan terhadap konstitusi itu sendiri. Postulat tersebut tentu didasarkan pada pemikiran bahwa Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional melaksanakan tugas menegakkan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini pertama, bagaimana eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya sebagai salah satu materi muatan undang-undang. Kedua, implikasi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi muatan undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, data yang dikumpulkan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pertama, eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi dapat terlihat dari apakah dilakukan tidak lanjut atau tidak oleh pembentuk undang-undang. Kedua, implikasi dari ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan merusak konsepsi negara hukum dan menimbulkan ketidaksinkronan terhadap peraturan perundang-undangan dan menjadikan produk hukum yang telah dibuat akan batal atau dapat dibatalkan sesuai ketentuan dari putusan Mahkamah Konstitusi.

